

# Win The Ocean Podcast

## Edisi

Regulasi Terbaru di Sidang IMO MSC 107 Telah Keluar:  
Ini Update Mengenai Kapal Autonomous Ship!

Juli  
2023

Issue 31



PT Biro Klasifikasi Indonesia berkesempatan untuk mendatangi pertemuan dengan pihak IMO (International Maritime Organization) di kantor pusat IMO yang berlokasi London untuk menghadiri pertemuan IMO MSC sesi ke 107 (Maritime Safety Committee). Sidang tersebut berlangsung dari tanggal 31 Mei 2023 s/d 9 Juni 2023. Pada sidang kali ini, IMO membagi beberapa poin menarik untuk dibahas. Salah satunya yaitu regulasi mengenai yang mengatur kapal Autonomous Ship atau yang dikenal dengan MASS (Maritime Autonomous Surface Ships).

*Hasil sidang MSC 107 menyebutkan bahwa regulasi terkait Autonomous Ship saat ini masih bersifat non-mandatory (atau belum diwajibkan), hal ini dikarenakan beberapa teknologi terkait Autonomous Ship masih terus dikaji ulang terkait keselamatan dan keamanan yang diprediksikan untuk selesai pada tahun 2028. Apabila regulasi ini sudah ditetapkan, negara-negara anggota IMO diwajibkan untuk menggunakan teknologi Autonomous Ship. Namun, saat ini penggunaan teknologi tersebut hanya disetujui untuk kapal-kapal barang saja. Untuk penggunaan teknologi Autonomous Ship pada kapal jenis High-speed Craft masih menunggu keputusan dari sidang MSC selanjutnya, yaitu IMO MSC 108*

Komite juga menegaskan bahwa terkait regulasi mengenai Autonomous Ship atau MASS mengenai pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi akan dibahas kemudian. Dikarenakan pengambilan keputusan terkait regulasi ini dianggap terlalu dini oleh komite.

Apabila kapal Autonomous Ship ini diberlakukan di Indonesia tentu saja pemerintah menunjuk PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk mempelajari regulasi dan mengkaji lebih terkait regulasi-regulasi yang berlaku terkait kapal Autonomous Ships ini. Selain itu perlu adanya pelatihan dan juga sertifikasi untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk mengoperasikan kapal Autonomous Ship ini.

Dengan adanya regulasi kapal Autonomous Ship ini tentu menjadi nilai tambah yang positif terhadap dunia maritim khususnya di Indonesia, hal tersebut menambah nilai keamanan bagi para awak kapal, dan memberikan keefektifan dalam mengambil keputusan ketika berlayar. Ini menjadikan dunia maritim Indonesia menjadi lebih aman dan tentram apabila kapal Autonomous Ship ini sudah diberlakukan.

# Win The Ocean Podcast

## Edisi

### Jalin Kerjasama Dengan Badak LNG, BKI Siap Untuk Menjadi Top 5 TIC Company di Asia Pasifik!

Juli  
2023

Issue 32



PT Biro Klasifikasi Indonesia telah melakukan pertemuan dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction atau Badak LNG di Bali pada tanggal 12 Juli 2023 dalam rangka melakukan penandatanganan Head Of Agreement (HOA) untuk berkolaborasi bersama. Badak LNG sendiri merupakan sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina.

*Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia sekaligus menyangkut sertifikasi kapal. Tidak hanya itu kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan kolaborasi di antara kedua perusahaan BUMN yang dimana sewaktu-waktu dapat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Venture (JV) ataupun bentuk kerja sama lainnya yang menggabungkan keunggulan dari setiap perusahaan.*

*R. Benny Susanto selaku Direktur Operasi IDSurvey menyebutkan bahwa "Bagi BUMN, penting adanya sinergi. Sinergi ini harus kita dukung juga dengan pemberian kepastian atas kualitas pekerjaan yang diberikan, ini penting juga sebagai pembuktian pentingnya sinergi antar BUMN sebagaimana yang dilakukan BKI dan Badak LNG ini. Langkah kita ini harus bisa memberikan nilai tambah, apakah dari sisi efisiensi ataupun sisi lainnya,"*

Perlu diketahui juga bahwasanya penandatanganan HOA ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MOU yang telah diadakan sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2023 lalu di Bontang Kalimantan Timur yang pada saat itu dihadiri juga oleh Direktur Operasional IDSurvey R. Benny Susanto dan juga Direktur Utama Badak LNG Gema I. P serta jajaran pejabat BKI dan Badak LNG lainnya.

Adanya kerjasama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia dengan Badak LNG menjadi sebuah wujud komitmen BKI untuk sebagai Induk Holding IDSurvey yang mempunyai target untuk menjadi Top 5 TIC Company di kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya penandatanganan HoA, dalam kesempatan ini juga dilakukan workshop atau diskusi terkait peluang kerjasama terkait dukungan layanan TIC (testing, inspection, certification) guna menunjang kegiatan operasi usaha pencairan dan distribusi gas alam seperti pekerjaan verifikasi dan due diligence (kualitas dan kuantitas bahan bakar, QA/QC, marine & corrosion assessment), jasa pengujian seperti DT, NDT & Commissioning Test, hingga jasa pelatihan dan penyediaan tenaga ahli terkait ISPS Code, ISM Code, dan K3 melalui BKI Academy kedepannya.

# Win The Ocean Podcast

**Edisi**

**Perdagangan Karbon Siap Keluar di Bulan September 2023,  
Ini Dia Info Selengkapnya!**

**Juli  
2023**

Issue 33



Dalam mendukung rencana NDC (*Nationally Determined Contribution*) untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi target pada tahun 2030, pemerintah Indonesia kini melakukan beberapa upaya untuk menguranginya. Salah satunya melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia.

Mekanisme perdagangan karbon sesuai dengan Permen LHK tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pasal 6 terdiri dari dua mekanisme, yaitu perdagangan emisi dan *offset* emisi GRK yang dapat dilakukan melalui bursa karbon maupun perdagangan langsung. Perdagangan karbon di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan September 2023 dan masih menunggu Peraturan dari OJK

Mekanisme Perdagangan Emisi dijelaskan pada Permen NEK Pasal 9-10 dimana negara menetapkan nilai emisi karbon yang boleh dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Jika perusahaan tersebut melewati batas yang ditetapkan (defisit), maka perusahaan tersebut harus berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan atau membeli nilai izin dari perusahaan yang memiliki surplus emisi.

Selanjutnya adalah Mekanisme Offset Emisi, hal yang membedakan dengan Perdagangan Emisi yaitu *Offset* Emisi akan berbasis *project*. *Project* tersebut perlu dibuat dokumen yang disebut Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) yang nantinya akan di daftarkan kepada SRN PPI Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuan *Offset* Emisi ini adalah untuk mengurangi emisi karbon di suatu negara dengan cara melakukan perhitungan berapa emisi karbon yang mampu diserap dari suatu perusahaan. Selanjutnya *project* tersebut akan dilakukan monitoring dan masuk ke tahap penyusunan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang bisa diperdagangkan di bursa karbon.

Saat ini, regulasi mengenai bursa karbon masih menunggu diterbitkannya Peraturan OJK yang seharusnya keluar pada bulan Juni lalu. Namun, hingga saat ini peraturan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan *stakeholder* terkait. Terbitnya peraturan ini dapat mengubah lanskap bisnis dan profitabilitas suatu perusahaan.

Kedua mekanisme perdagangan karbon ini tentunya sangat membantu Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon dan mendukung target NDC pada tahun 2030 dan *net zero emission* pada tahun 2060 dan juga menjadi *revenue stream* baru bagi perusahaan yang berpartisipasi